

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP
PENGENDARA SEPEDA MOTOR TANPA DILENGKAPI
SURAT YANG SAH DI POLRESTA PADANG**

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :



RAGANDHI TANLIN
2110112090

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

**Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H
Yandriza, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 26/PK-IV/III/2025

)

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah seperti SIM dan STNK merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang semakin marak terjadi, khususnya di wilayah hukum Polresta Padang. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi aparat kepolisian dalam menegakkan hukum serta menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini dilakukan melalui sistem tilang, baik elektronik (E-TLE) maupun non-elektronik, serta operasi rutin yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dan studi kepustakaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: 1) Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pengendara sepeda motor tanpa dilengkapi surat yang sah di Polresta Padang? dan 2) Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut? Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka pelanggaran disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta sikap "nekat" pengendara yang merasa tidak akan dikenakan sanksi. Penegakan hukum didasarkan pada ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, khususnya **Pasal 288 ayat (1)** mengenai kewajiban membawa surat-surat kendaraan bermotor, serta **Pasal 281** tentang kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu, digunakan juga dasar hukum dari **Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012** tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran, serta **Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021** tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Kendala utama yang dihadapi pihak kepolisian meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, serta pertimbangan sosial dan ekonomi dalam penindakan, khususnya terhadap pelanggaran oleh masyarakat kurang mampu. Saran dari penelitian ini mencakup perlunya peningkatan sosialisasi hukum, edukasi publik, serta pembentukan regulasi dan kerja sama antarinstansi untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dan humanis.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Sepeda Motor, Surat Kendaraan